

INTISARI

Pariwisata merupakan sektor unggulan bagi Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Berbagai upaya untuk mengembangkan dan mempertahankan pertumbuhan sektor pariwisata memerlukan keterlibatan dan peran aktif dari berbagai aktor atau *stakeholder*. Desa Giritengah kecamatan Borobudur memiliki potensi ekonomi melalui alamnya sebagai tempat wisata, akan tetapi pengembangan desa wisatanya terhambat oleh masalah pengelolaan sumber daya manusia, kurangnya keterlibatan warga, dan kurangnya pengetahuan warga. Perspektif struktur jaringan sebagai bagian dari teori *collaborative governance* menjadi pisau analisis dan kebaruan penelitian dibandingkan beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian ini berfokus pada aspek penting dari struktur jaringan yaitu pemerintahan sendiri, organisasi pimpinan, dan administrasi jaringan organisasi. Hal tersebut bertujuan untuk menemukan struktur jaringan yang optimal untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di desa Giritengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam secara langsung, serta data sekunder diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata Giritengah, Borobudur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata Giritengah sudah menerapkan struktur jaringan yang bersifat pemerintahan sendiri. Namun dalam kenyataannya desa wisata Giritengah ini belum menerapkan secara konsisten dan paten apabila merujuk teori dari (Milward & Provan, 1995). Padahal para *stakeholder* sudah mengupayakan pengelolaan desa wisata yang jelas dan terstruktur. Hal tersebut ditandai dengan tidak adanya entitas administrasi yang jelas karena mereka tidak terikat kontrak serta tidak ada pembagian tugas yang jelas antar anggota, serta langkah dan strategi yang para *stakeholder* lakukan belum efisien dan efektif untuk dapat menghidupkan kembali desa wisata Giritengah yang sudah terlanjur tidak beroperasi. Desa wisata Giritengah menghadapi tantangan, termasuk konflik antara *stakeholder* yang kurang berkoordinasi, kepemimpinan yang lemah menghambat pencapaian tujuan, dan sistem pengelolaan organisasi yang rumit menyebabkan ketidakjelasan dalam pembagian tugas, dan menghambat efektivitas organisasi. Dalam pengembangan desa wisata Giritengah, target utama *stakeholder* adalah berupaya menghidupkan kembali desa wisata Giritengah. Namun, upaya memanfaatkan media sosial sebagai media promosi masih kurang maksimal. Untuk meningkatkan efektivitas tersebut, diperlukan program pelatihan berkelanjutan dalam pengelolaan website, informasi, dan teknologi. Pelatihan ini harus dipimpin oleh ahli bidangnya dan diperbarui secara berkala agar desa tetap relevan dengan perkembangan pariwisata dan teknologi.

Kata Kunci: Desa wisata, Giritengah, Struktur jaringan, *Stakeholder*.

ABSTRACT

Tourism is a leading sector for Indonesia to increase economic growth. Various efforts to develop and maintain the growth of the tourism sector require the involvement and active role of various actors or stakeholders. Giritengah village, Borobudur subdistrict, has economic potential through its nature as a tourist spot, however the development of its tourist village is hampered by problems with human resource management, lack of citizen involvement, and lack of citizen knowledge. The network structure perspective as part of collaborative governance theory is a tool for analysis and research novelty compared to several previous studies. This research focuses on important aspects of network structure, namely self-government, lead organizations, and organizational network administration. This aims to find the optimal network structure to improve the economy of the community in Giritengah village. This study uses a qualitative method. The type of data used in this research is primary data obtained through direct in-depth interviews, as well as secondary data obtained through official documents related to the development of the tourist village of Giritengah, Borobudur.

The research results show that in implementing the development of the Giritengah tourist village, a self-governing network structure has been implemented. However, in reality, the Giritengah tourist village has not implemented it consistently and patently when referring to the theory of (Milward & Provan, 1995). Even though the stakeholders have attempted clear and structured tourism village management. This is characterized by the absence of a clear administrative entity because they are not bound by contracts and there is no clear division of tasks between members, and the steps and strategies taken by stakeholders are not yet efficient and effective in being able to revive the Giritengah tourist village which is no longer operational. The Giritengah tourist village faces challenges, including conflicts between stakeholders who lack coordination, weak leadership hinders the achievement of goals, and a complicated organizational management system that causes ambiguity in the division of tasks, and hinders organizational effectiveness. In developing the Giritengah tourist village, the main target of stakeholders is to try to revive the Giritengah tourist village. However, efforts to utilize social media as a promotional medium are still not optimal. To increase this effectiveness, ongoing training programs are needed in managing websites, information and technology. This training must be led by experts in the field and updated regularly so that the village remains relevant to tourism and technological developments.

Keywords: Tourism village, Giritengah, Network structure, Stakeholders.